



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 392-398

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Realisasi Anggaran Publik di Kota Makassar: Kajian Kritis Manajemen Keuangan Daerah

Andi Ruth Reny Purnama Ningrat

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Publik Makassar

Email: ruthrheny21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas realisasi anggaran publik Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 yang secara administratif menunjukkan capaian tinggi, namun masih menyisakan persoalan substantif dalam manajemen keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka kritis dengan menganalisis data sekunder dari dokumen resmi, termasuk data statistik dan dokumen APBD Kota Makassar. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tingkat realisasi pendapatan dan belanja daerah mencapai lebih dari 99%, terjadi penurunan signifikan pada belanja modal, ketergantungan tinggi pada pendapatan dari pajak daerah, serta ketimpangan capaian Pajak Bumi dan Bangunan antar kecamatan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran belum tercapai secara menyeluruh. Interpretasi hasil mengindikasikan perlunya reformasi dalam tata kelola fiskal daerah, melalui penguatan penganggaran berbasis kinerja, diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi anggaran. Simpulan dari penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan realisasi anggaran secara nominal belum mencerminkan kualitas manajemen keuangan publik yang efektif, merata, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Realisasi Anggaran Publik, Kota Makassar, Kajian Kritis, Manajemen Keuangan Daerah

1. Latar Belakang

Efektivitas realisasi anggaran publik merupakan isu sentral dalam manajemen keuangan daerah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*), kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari tinggi rendahnya serapan anggaran, tetapi juga dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena umum yang kerap terjadi adalah terjadinya tingginya angka realisasi anggaran, namun tidak diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik dan penyelesaian masalah-masalah struktural daerah (Manşûr, 2021), (Sari et al., 2024), (Milenia et al., 2022).

Dalam konteks Kota Makassar, realisasi APBD tahun 2024 menunjukkan angka yang impresif secara kuantitatif. Data Kota Makassar Dalam Angka 2025 mencatat bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,20 triliun, dan belanja daerah mencapai Rp4,19 triliun, atau setara dengan 99,76% dari total anggaran yang ditetapkan (BPS Kota Makassar, 2025). Namun, di balik capaian tersebut, terdapat pergeseran struktur anggaran yang patut dikritisi (Ramadani et al., 2021), (Amelinda et al., 2022), (Putra et al., 2023). Salah satunya adalah penurunan tajam belanja modal dari Rp1,13 triliun pada tahun 2023 menjadi hanya Rp726 miliar pada tahun 2024, yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan jangka panjang (BPS Kota Makassar, 2025), (Bakhtiar et al., 2023).

Ketimpangan juga tampak dari segi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih sangat bergantung pada sektor pajak daerah, terutama PBB dan pajak restoran, dengan kontribusi mencapai Rp1,41 triliun dari total PAD Rp1,6 triliun. Namun, kinerja realisasi PBB di tingkat kecamatan menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Kecamatan Manggala hanya merealisasikan 65,39%, sedangkan Kepulauan Sangkarrang justru melampaui 150% dari target (BPS Kota Makassar, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan, penagihan, dan evaluasi penerimaan daerah yang berdampak pada ketidakseimbangan fiskal antarwilayah (Nabilah & Moorcy, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis efektivitas realisasi anggaran publik di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Fokus kajian diarahkan pada struktur dan distribusi belanja, kinerja PAD, serta ketepatan alokasi terhadap kebutuhan

masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mendasar: apakah realisasi anggaran yang tinggi secara nominal telah sejalan dengan prinsip efektivitas anggaran dalam manajemen keuangan daerah?.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian ilmu administrasi publik dan manajemen keuangan daerah dengan menawarkan pendekatan evaluatif berbasis *critical literature review*. Studi ini memperkaya literatur tentang evaluasi fiskal yang tidak semata didasarkan pada capaian angka serapan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi daerah dan kualitas distribusi anggaran. Sementara itu, kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan berbasis data dan analisis kepada Pemerintah Kota Makassar serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil, efisien, dan berdampak luas.

Tingginya realisasi anggaran di Kota Makassar tidak selalu mencerminkan kinerja anggaran yang efektif, terutama ketika belanja modal menurun, PAD belum tergarap optimal di luar sektor pajak, dan disparitas penerimaan antar kecamatan masih tinggi. Implikasi praktisnya, Pemerintah Kota Makassar perlu menerapkan pendekatan *performance based budgeting*, memperkuat transparansi fiskal, serta melakukan pemetaan terhadap kecamatan yang mengalami capaian rendah dalam pendapatan dan pelayanan publik (Prasetya et al., 2023), (Ramadani et al., 2021).

Dengan melihat bahwa realisasi anggaran tidak bisa hanya dimaknai secara numerik, maka perlu dilakukan reformasi manajemen fiskal daerah secara menyeluruh. Penguatan kapasitas perencanaan, peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan anggaran, serta inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah langkah strategis yang tidak bisa ditunda (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, artikel ini mengajukan pentingnya evaluasi berkelanjutan berbasis data dan konteks lokal dalam membangun sistem keuangan daerah yang sehat dan berkeadilan.

Melalui pendekatan studi pustaka kritis yang berbasis pada data empirik dan teori-teori manajemen keuangan publik, diharapkan artikel ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menjadi rujukan nyata bagi pelaku kebijakan dalam menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas fiskal daerah secara holistik dan berkelanjutan (Jaelani & Rizky, 2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 dan berlokasi secara virtual melalui analisis data-data sekunder yang diperoleh dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempat penelitian secara administratif merujuk pada wilayah kerja Pemerintah Kota Makassar, khususnya terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang tercatat dalam dokumen resmi Kota Makassar Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh BPS (Pappa et al., 2023).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka kritis (*critical literature review*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efektivitas realisasi anggaran publik berdasarkan data empiris yang tersedia, serta mengevaluasi praktik manajemen keuangan daerah dalam kerangka teoritis yang relevan (Habibi et al., 2024). Studi pustaka kritis dipilih karena mampu mengidentifikasi gap antara teori dan realitas implementasi kebijakan fiskal, sekaligus menawarkan rekomendasi berbasis analisis literatur dan data resmi (Lisnasari et al., 2022).

Objek penelitian adalah sistem manajemen anggaran publik di Kota Makassar, dengan fokus pada realisasi APBD tahun 2024, yang terdiri dari aspek pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan struktur pengelolaan fiskal. Subjek kajian adalah dokumen-dokumen resmi seperti laporan BPS, Peraturan Daerah terkait APBD, literatur ilmiah mengenai manajemen keuangan daerah, serta peraturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan (Halijah & Nurwani, 2022), (Retnosari et al., 2022).

Definisi operasional variabel utama dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: (1) Efektivitas realisasi anggaran: Tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana pendapatan dan belanja daerah yang tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari segi ketepatan alokasi, efisiensi, dan dampaknya terhadap layanan publik (Tangdi, 2025). (2) Manajemen keuangan daerah: Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan keuangan daerah sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Variabel dalam penelitian ini meliputi: (1) Variabel utama: Efektivitas realisasi anggaran publik (variabel terikat). (2) Variabel bebas: Komponen manajemen keuangan daerah, termasuk struktur belanja, PAD, dan alokasi belanja modal (Sitorus et al., 2025), (Eka et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen (*documentary review*) yang bersumber dari: (1) Kota Makassar Dalam Angka 2025 (BPS), (2) Dokumen realisasi APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (3) Jurnal ilmiah terkait evaluasi fiskal dan efektivitas anggaran, dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Wattimury, 2023).

Instrumen penelitian berupa tabel telaah literatur dan matriks analisis tematik terhadap indikator keuangan daerah, seperti: persentase realisasi pendapatan dan belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, capaian target PAD, serta distribusi realisasi antar wilayah kecamatan.

Teknik analisis data menggunakan analisis konten (*content analysis*) dan interpretasi tematik (Darmawan et al., 2024), (Pidjer et al., 2025). Data-data kuantitatif dianalisis secara deskriptif-komparatif, lalu dikritisi menggunakan teori-teori manajemen anggaran daerah dan konsep *value for money*. Peneliti mengelompokkan temuan berdasarkan kesesuaian antara rencana anggaran dan capaian realisasi, serta mengevaluasi efisiensi dan dampaknya.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan non-eksperimental dan berbasis dokumen, pengujian hipotesis dilakukan secara deduktif-kritis melalui validasi argumentatif terhadap kerangka teoritis dan bukti empiris yang ada. Dengan demikian, simpulan dan saran disusun berdasarkan logika ilmiah yang kuat dan relevansi konteks lokal (Arafah & Najamuddin, 2023), (Arifin et al., 2024).

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kinerja manajemen anggaran Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, khususnya pada efektivitas realisasi anggaran publik. Dalam konteks ini, objek utama yang dikaji meliputi struktur pendapatan dan belanja daerah, komposisi belanja modal, serta performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sumber data utama yang dianalisis adalah dokumen Kota Makassar Dalam Angka 2025 (BPS Kota Makassar, 2025), dokumen APBD, serta regulasi pengelolaan keuangan daerah yang relevan (Abbas et al., 2023), (Mahanani & Maskudi, 2020).

Karakteristik objek penelitian ini mencerminkan kompleksitas fiskal di kota besar seperti Makassar, yang memiliki tanggung jawab penganggaran tinggi namun di sisi lain menghadapi tantangan struktural. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan publiknya menjadi sangat penting, tidak hanya bagi internal pemerintah daerah, tetapi juga sebagai cerminan kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik.

3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah: Tinggi tapi Belum Menentu

Hasil analisis menunjukkan bahwa total pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 mencapai Rp4,20 triliun, dan realisasi belanja mencapai Rp4,19 triliun. Realisasi ini mencerminkan tingkat serapan anggaran sebesar 99,76%, atau hampir sempurna jika diukur dari parameter administratif (Kartika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa secara teknokratis, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai mekanisme formal yang ditetapkan dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Namun demikian, capaian tersebut perlu dikritisi lebih dalam. Realisasi tinggi secara nominal belum tentu mengindikasikan keberhasilan dalam manajemen anggaran jika tidak diimbangi dengan evaluasi terhadap dampak dan kualitas belanja. Dalam kerangka evaluasi kinerja publik modern, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari sisi output administratif, tetapi juga dari *outcome* pembangunan yang mencerminkan kebermanfaatannya anggaran bagi masyarakat luas (Rachmawati & Indudewi, 2024), (Hadiwibowo et al., 2023).

3.2 Penurunan Belanja Modal: Sinyal Lemahnya Investasi Publik

Salah satu indikator yang menunjukkan pergeseran kebijakan fiskal Kota Makassar adalah penurunan signifikan pada belanja modal. Pada tahun 2023, belanja modal mencapai Rp1,13 triliun, sedangkan pada tahun 2024 hanya sebesar Rp726 miliar, menurun sekitar 35% (BPS Kota Makassar, 2025). Padahal, belanja modal merupakan instrumen utama dalam pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas layanan publik yang berkelanjutan.

Penurunan belanja modal ini menimbulkan kekhawatiran karena belanja ini adalah investasi pemerintah untuk kepentingan jangka panjang. Jika proporsinya menurun, maka pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, saluran air, dan gedung pelayanan publik, berisiko terhambat. Keadaan ini juga bisa mencerminkan preferensi anggaran yang lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, sehingga berdampak pada rendahnya kapasitas pelayanan publik dalam jangka menengah dan panjang.

3.3 Struktur PAD yang Tidak Seimbang

Komponen PAD Kota Makassar juga menunjukkan kecenderungan yang belum seimbang. Pada tahun 2024, PAD mencapai Rp1,60 triliun, dengan pajak daerah sebagai kontributor utama sebesar Rp1,41 triliun (BPS Kota Makassar, 2025). Komponen lain seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya memberikan kontribusi kecil. Ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan masih bergantung pada sumber konvensional yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Dominasi pajak daerah dalam struktur PAD menunjukkan lemahnya eksplorasi terhadap potensi ekonomi lokal yang lain. Misalnya, peluang dari pengelolaan aset daerah, kerja sama daerah-swasta, atau layanan publik berbasis digital belum dimanfaatkan secara optimal. Ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan utama

membuat fiskal daerah rentan, terlebih jika terjadi perlambatan ekonomi atau menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.4 Ketimpangan Penerimaan PBB antar Kecamatan

Temuan lain yang cukup menonjol adalah ketimpangan capaian PBB antar kecamatan. Kecamatan Manggala hanya mampu merealisasikan 65,39% dari target, sementara Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bahkan melampaui target dengan capaian 150,83% (BPS Kota Makassar, 2025). Disparitas ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam potensi fiskal dan kapasitas penarikan pajak antar wilayah di Kota Makassar (Sipi & Tandi, 2021).

Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas pendataan objek pajak, efektivitas sistem pemungutan, serta kepatuhan masyarakat. Kecamatan-kecamatan padat penduduk seperti Manggala seharusnya memiliki potensi PBB yang besar, namun capaian yang rendah menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak belum terintegrasi dengan baik. Hal ini berimplikasi pada ketimpangan pelayanan publik karena distribusi anggaran sangat mungkin mengikuti kapasitas penerimaan tiap wilayah.

3.5 Evaluasi Menggunakan Pendekatan *Value for Money*

Jika diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori *value for money*, maka realisasi anggaran Kota Makassar telah memenuhi unsur efisiensi, namun masih bermasalah dalam aspek efektivitas. Realisasi anggaran tinggi menunjukkan bahwa belanja telah dilakukan sesuai jadwal dan jumlah, namun belum tentu berdampak positif terhadap capaian kinerja pembangunan. Hal ini tampak pada turunnya belanja modal dan stagnannya sektor penerimaan alternatif PAD (Wahyuni & Ali, 2024), (Sianturi & Dwicaksono, 2023).

Prinsip *value for money* menekankan tiga dimensi: *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*. Dalam konteks ini, Kota Makassar telah mencapai aspek ekonomi dan efisiensi dalam proses penganggaran dan belanja. Namun, pada aspek efektivitas, masih dibutuhkan evaluasi lebih jauh karena belum terlihat adanya peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan warga.

3.6 Efektivitas Belum Tercapai

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini dapat dijawab secara tegas: realisasi anggaran yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas manajemen keuangan publik. Efektivitas bukan hanya menyangkut capaian administratif, tetapi juga tentang bagaimana anggaran berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar warga dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan perspektif baru dalam mengevaluasi anggaran daerah. Pemerintah Kota Makassar harus mulai mengedepankan indikator kinerja pembangunan dalam menyusun dan mengevaluasi APBD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (lalapan, 2022).

3.7 Pengujian Hipotesis: Terbukti melalui Temuan Empirik

Hipotesis awal dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan efektivitas manajemen anggaran publik. Berdasarkan data dan analisis yang disajikan, hipotesis tersebut dapat diterima. Beberapa indikator seperti penurunan belanja modal, ketergantungan terhadap pajak daerah, dan ketimpangan PBB antar kecamatan memperkuat argumen tersebut.

Secara akademik, temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya seperti Indrayani (2022) yang menekankan pentingnya evaluasi substansi anggaran, bukan hanya pada realisasi nominal. Hal ini menegaskan bahwa anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance based budgeting*), bukan semata-mata kepatuhan administratif terhadap siklus APBD.

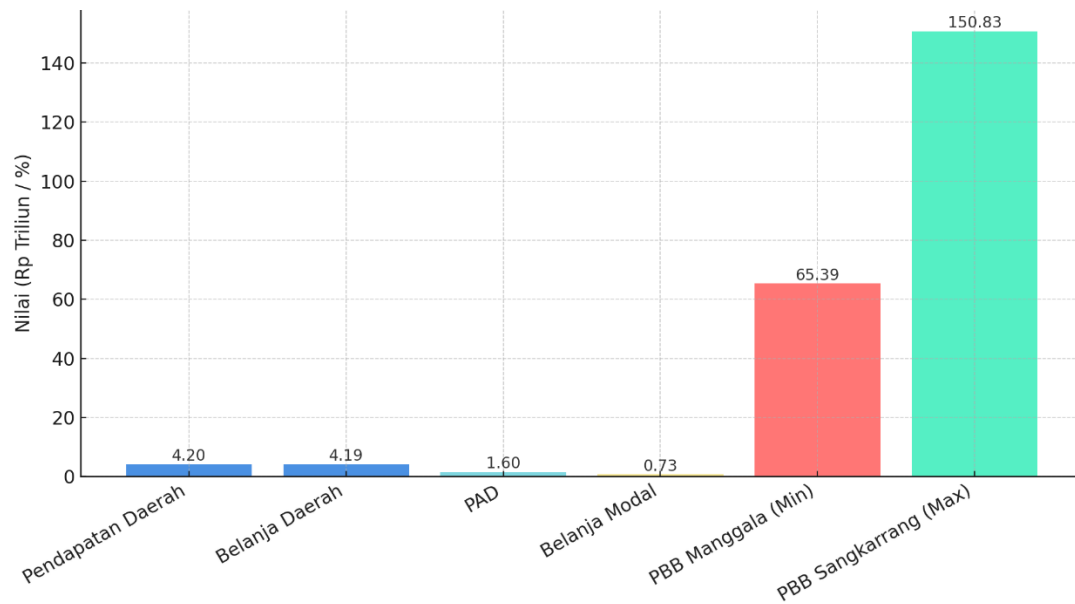
3.8 Rekomendasi Strategis dari Temuan

Temuan dari penelitian ini mengarah pada beberapa rekomendasi penting. Pertama, Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong reformasi fiskal dengan memperkuat kapasitas belanja modal, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, pemerintah perlu memperluas basis PAD dengan menjajaki sektor-sektor baru, seperti pemanfaatan aset daerah, kolaborasi dengan sektor swasta, serta digitalisasi layanan publik.

Ketiga, perlu dilakukan pembenahan sistem pengelolaan PBB agar lebih merata antar wilayah. Ini dapat dimulai dengan pemutakhiran data pajak berbasis geospasial dan peningkatan insentif kepada kecamatan dengan capaian rendah. Keempat, perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran agar proses pengelolaan keuangan publik lebih transparan, responsif, dan inklusif.

Untuk memperkuat temuan, disajikan diagram batang yang menunjukkan indikator utama realisasi anggaran publik dan penerimaan PBB. Nilai realisasi pendapatan dan belanja mendekati Rp4,2 triliun, dengan PAD sebesar Rp1,6 triliun dan belanja modal hanya Rp726 miliar. Sementara itu, capaian PBB sangat bervariasi, mulai dari 65,39% hingga 150,83%. Data ini menunjukkan bahwa disparitas fiskal antar wilayah cukup signifikan dan perlu ditangani secara sistemik.

Diagram batang di bawah ini tidak hanya merepresentasikan kekuatan fiskal Kota Makassar secara makro, tetapi juga menyoroti tantangan pemerataan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan pendekatan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam menyusun kebijakan anggaran dan program pembangunan yang lebih merata dan inklusif.



Gambar 1. Indikator Kunci Realisasi Anggaran dan PBB Kota Makassar 2024

Diagram batang di atas menyajikan enam indikator utama yang mencerminkan kekuatan fiskal dan sekaligus problematika struktural dalam manajemen keuangan Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2024. Empat indikator pertama menggambarkan nilai absolut dalam triliunan rupiah, sedangkan dua indikator terakhir menggambarkan persentase capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di dua kecamatan ekstrem: Manggala (terendah) dan Kepulauan Sangkarrang (tertinggi).

Pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing sebesar Rp4,20 triliun dan Rp4,19 triliun menandakan kestabilan makro fiskal. Selisih yang nyaris tidak ada menunjukkan bahwa Pemkot Makassar sangat disiplin secara administratif. Ini dapat menjadi indikator keberhasilan pengendalian fiskal. Namun, indikator PAD yang hanya Rp1,60 triliun mengungkap fakta penting: hampir 60% pendapatan masih bergantung pada transfer dari pusat dan provinsi. Ini menggambarkan kerentanan kemandirian fiskal.

Lebih jauh lagi, belanja modal hanya sebesar Rp726 miliar, yang jauh lebih rendah dari total belanja daerah. Ini merupakan sinyal serius. Secara ideal, belanja modal yang berperan dalam pembangunan jangka panjang seharusnya menempati porsi strategis. Proporsi belanja modal yang kecil mencerminkan kecenderungan fiskal yang cenderung konsumtif, bukan produktif. Hal ini tentu berdampak pada stagnasi kualitas pelayanan publik dan keterbatasan ekspansi pembangunan infrastruktur kota.

Poin paling mencolok adalah ketimpangan capaian PBB antar kecamatan: Manggala hanya 65,39%, sementara Kepulauan Sangkarrang mencapai 150,83% dari target. Perbedaan hampir 2,5 kali lipat ini menunjukkan disfungsi dalam sistem pengelolaan pajak daerah secara spasial.

Kecamatan Manggala, sebagai salah satu wilayah urban yang padat penduduk dan memiliki potensi PBB tinggi, justru menunjukkan kinerja paling buruk. Hal ini bisa disebabkan oleh kelemahan dalam pendataan aset, rendahnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya fungsi penagihan dan pengawasan. Sebaliknya, capaian luar biasa di Kepulauan Sangkarrang justru menjadi anomali yang menuntut verifikasi: apakah itu

disebabkan oleh pembaruan data aset yang agresif, kesadaran pajak yang tinggi, atau faktor koreksi target yang terlalu rendah sebelumnya.

Terjadi dua realitas kontras Kota Makassar: di satu sisi, pemerintah kota sangat rapi secara administratif, namun di sisi lain, masih lemah secara strategis dalam membangun fiskal yang kuat dan merata. Ini memperkuat argumen dalam artikel bahwa efektivitas realisasi anggaran tidak bisa hanya dinilai dari angka serapan, tetapi harus disandingkan dengan kualitas, distribusi, dan dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif yang berbasis spasial: setiap kecamatan perlu dipetakan ulang secara fiskal. Daerah dengan capaian rendah harus didorong dengan strategi peningkatan pendapatan, pemberdayaan petugas pajak lapangan, hingga pelatihan bagi aparat kelurahan dalam menggali potensi lokal.

4. Kesimpulan

Tingginya tingkat realisasi anggaran publik Kota Makassar tahun anggaran 2024, yang mencapai 99,76% untuk pendapatan dan belanja daerah, belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas manajemen keuangan daerah. Evaluasi berbasis pendekatan value for money menunjukkan bahwa efisiensi administrasi telah dicapai, namun efektivitas penggunaan anggaran masih lemah, terutama terlihat dari turunnya alokasi belanja modal, dominasi pajak daerah dalam struktur PAD, serta disparitas realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antar kecamatan. Implikasi praktis dari temuan ini mengarah pada pentingnya reformasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), penguatan belanja modal yang produktif, diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, serta penguatan sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih adil dan adaptif antar wilayah. Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran, serta memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi dalam analisis kebutuhan dan dampak anggaran terhadap masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini sepenuhnya berbasis pada data sekunder dan belum mengakomodasi wawancara atau data kualitatif dari pelaksana kebijakan dan warga penerima manfaat. Kedua, pendekatan studi pustaka kritis membatasi ruang untuk generalisasi temuan karena konteks sosial-politik Kota Makassar yang unik. Ketiga, evaluasi efektivitas anggaran dalam penelitian ini tidak mencakup pengukuran langsung terhadap *outcome* program-program spesifik di bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lapangan berbasis mixed-method, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi langsung, dan survei publik untuk memperdalam pemahaman atas efektivitas belanja sektor tertentu. Penelitian di masa depan juga dapat menggunakan analisis spasial untuk mengevaluasi sebaran geografis ketimpangan fiskal dan kualitas layanan publik sebagai dampak langsung dari alokasi anggaran yang tidak merata. Hal ini akan memperkaya perspektif pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola publik yang lebih responsif dan berkeadilan.

Referensi

- Abbas, I., Hamzah, Muh. N., & Didiharyono, D. (2023). Analisis Good Governance Dan Kualitas Pegawai Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *JSMN*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v2i2.161>
- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., & Nasution, Y. N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2). <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179>
- Arafah, R., & Najamuddin, H. K. (2023). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Transfer Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan. *Ak99*, 3(2), 323–332. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i2.2676>
- Arifin, A. A., Silaen, D. B., Damayanti, D., & Saputra, D. I. (2024). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementerian Perhubungan Tahun 2021. *Jimr*, 2(7), 67–72. <https://doi.org/10.62504/jimr744>
- Bakhtiar, N., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2023). Transparansi Akuntabilitas Realisasi Anggaran Publik Berdasarkan Prinsip Islam Dalam Mencegah Praktik Korupsi (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar). *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(1), 45–59. <https://doi.org/10.61911/income.v2i1.30>
- BPS Kota Makassar. (2025). *Kota Makassar dalam Angka (Makassar Municipality in Figures)* (Vol. 26). BPS Kota Makassar.
- Darmawan, D., Roswinna, W., Anggraeni, A. F., Sukmayana, D., & Suryaman, S. (2024). Peranan Perencanaan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran (Studi Pada Universitas Padjadjaran Bandung). *JSTL*, 2(3), 112–116. <https://doi.org/10.38035/jstl.v2i3.240>
- Eka, R., Yusnia, E., Telaumbanua, N., Lucyana, I., & Marlina, E. (2024). Analisis Realisasi Anggaran Pada PT Wijaya Machinery Perkasa. *Jimr*, 2(6), 646–657. <https://doi.org/10.62504/jimr670>
- Habibi, H., Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–489. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Hadiwibowo, Y., Priharjanto, A., Usman, F., & Rakinaung, E. (2023). Peranan Mediasi Belanja Pemerintah Dan Moderasi Akuntabilitas Keuangan Terhadap Perekonomian Daerah. *Akurasi Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 481–498. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i2.438>
- Halijah, N., & Nurwani, N. (2022). ANALISIS PENDAPATAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan). *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 365. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i4.2248>
- Hidayat, M. T. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Literatur Review. *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(11), 1336–1347. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i11.1035>

- Jaelani, R., & Rizky, M. (2023). Politik Anggaran Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Maratua. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 172–185. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10065>
- Kartika, Y. (2023). KINERJA KEUANGAN DAERAH: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Dan Share and Growth. *Jurnal Fairakuntansi Muda*, 3(2), 110–119. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v3i2.5559>
- lalapan, marni. (2022). "Pengaruh Iklim Organisasi, Pendidikan Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala". <https://doi.org/10.31219/osf.io/m9n3y>
- Lisnasari, L., Guasmin, G., & Haryani, S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2), 89–95. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i2.2232>
- Mahanani, S., & Maskudi, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Indonesia. *Akses Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3781>
- Manşur, M. (2021). Manajemen Pengeluaran Daerah Di Indonesia: Penanganan Krisis Kesehatan Dan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19. *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 116. <https://doi.org/10.20961/sp.v16i2.54289>
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Jakp*, 5(2), 105–113. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.986>
- Nabilah, B., & Moocy, N. H. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019 – 2021 Pemerintah Kota Balikpapan. *Media Riset Ekonomi [Mr Eko]*, 2(2), 95–103. <https://doi.org/10.36277/mreko.v2i2.276>
- Pappa, L., Menne, F., & Suriani, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1), 01–16. <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3870>
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *MRB*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Prasetya, R. P., Herabudin, H., & Fitri, F. (2023). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Eksternal Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. *Jurnalku*, 3(2), 137–150. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.365>
- Putra, A. A. G. S. K., Pancawati, R. S., & Waskito, I. (2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana Lombok Timur Dengan Konsep Value for Money. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 1–11. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i3.725>
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Solusi*, 22(2), 187–196. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Ramadani, Y., Rahayu, S., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas – Dinas Di Provinsi Jambi). *Jar*, 1(3), 245–259. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i3.13568>
- Retnosari, M. C., Suryawati, C., & Harto, P. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Di RSUD Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(3), 231–240. <https://doi.org/10.14710/jmki.10.3.2022.231-240>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jeae*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38–59. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205>
- Sipi, A. D. S., & Tandil, A. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11). <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.246>
- Sitorus, P. A., Siallagan, H., & Sidabutar, R. C. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Menilai Kinerja Keuangan Desa (Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, 5(1), 188–192. <https://doi.org/10.47233/jebs.v5i1.2597>
- Tangdi, M. M. (2025). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 4(4), 6566–6573. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8015>
- Wahyuni, F., & Ali, H. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3), 583–593. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.2030>
- Wattimury, N. O. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Melalui Pengawasan Anggaran Pada Politeknik Negeri Ambon. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3433–3441. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2070>